

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI DESA BATI KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

SESILIA SUSI SUSANTI^{1*}
NIM. E1012151069

Dr. Lina Sunyata, M.Si², Ira Patriani, S.IP, M.Si²

*Email: sesiliasusisusanti97@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di desa bati kecamatan seberuang kabupaten kapuas hulu. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih banyaknya anak putus sekolah di desa bati yakni sekitar 50 % dan masih terdapat masyarakat yang kurang peduli terhadap pendidikan serta rendahnya partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan. Teori yang digunakan adalah teori smith, dimana ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: a) kebijakan yang diidealkan; b) kelompok sasaran; c) badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab; d) unsur-unsur lingkungan. Paradigma kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyusun penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan wajib belajar 9 tahun di desa bati kecamatan seberuang kabupaten kapuas hulu adalah: a) kebijakan yang diidealkan berupa kurang optimalnya perealisasi kebijakan berdasarkan aturan yang berlaku; b) kelompok sasaran berupa tanggapan kelompok sasaran yang masih kurang mendukung; c) badan-badan pelaksana yang bertanggungjawab yang belum pernah melakukan sosialisasi kebijakan; d) unsur-unsur lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan. Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi pemerintah kabupaten kapuas hulu agar lebih meningkatkan adanya motivasi bagi sasaran program, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana atau prasarana, dan melakukan sosialisai dalam implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun sehingga permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan cepat.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun, Faktor-Faktor

ABSTRACT

The aim of this study is to provide an understanding of the factors that have led to the lack of success of the implementation of the 9-year compulsory education policy in Bati village of Seberuang Sub-district of Kapuas hulu Regency. The problem in this study is that there are still many school dropouts in Bati village, which is around 50% and there are still people who are less concerned about education and low community participation in policy implementation. The theory used is the Smith theory, where there are four factors that influence policy implementation, namely: a) idealized policy; b) target group; c) responsible implementing agencies; d) environmental elements. The qualitative paradigma with the type of descriptive research is the approach used to conduct this research. The results of this study show that the factors that influence the 9-year compulsory education policy in the Bati village of Seberuang Sub-district of Kapuas Hulu Regency are: a) the idealized policy is in the form of low realization of the policy based on the applicable rules; b) the target group is in the form of the response that is still less supportive; c) responsible implementing agencies that have never disseminated the policy; d) environmental elements that have not fully supported the policy. Suggestions related to the results of this study are as follows: it is expected that the Kapuas Hulu district government to increase motivation for program targets, improve the quality and quantity of facilities or infrastructure, and conduct socialization in the implementation of the 9-year compulsory education policy so that the problem can be resolved quickly.

Keywords: *Implementation, 9-Year Compulsory Education Policy, Factors*

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan selain keimanan seseorang, karena dengan pendidikan yang baik bisa menunjang kepribadian seseorang dalam arti hal pemikiran atau pola pikir seseorang. Semakin tinggi suatu tingkat pendidikan seseorang maka akan baik. Pendidikan juga bisa memberi nilai lebih bagi seseorang, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berguna bahkan hingga akhir hayat. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Pasal 6 ayat 1) tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (pasal 5 ayat 1) tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11 ayat (1) menyatakan “Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Wajib belajar ini sasarannya adalah setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Artinya setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dengan mengikuti program wajib belajar. Sementara pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sebab wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Dalam Ketentuan Umum disebutkan bahwa program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga Negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga Negara Indonesia usia wajib belajar berhak

mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Permasalahan tentang pendidikan yang terjadi di dunia merupakan bentuk masalah sosial yang mau tidak mau harus dihadapi dan diatasi oleh setiap pemerintah mengalaminya, termasuk negara Indonesia yang merupakan salah satu negara yang digeluti oleh berbagai masalah sosial, salah satu diantaranya yaitu masalah di bidang pendidikan.

Program wajib belajar 9 tahun merupakan program pendidikan universal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan di Kabupaten Kapuas Hulu program ini diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu

Peningkatan wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun, berkonsekuensi bagi penyediaan prasarana dan sarana, biaya dan tenaga pendidikan yang memadai. Kedua, ketidakseimbangan pendidikan secara horizontal. Ketidakseimbangan ini bersentuhan dengan persoalan jenis dan jenjang pendidikan.

Adapun penyebab masyarakat yang tidak tamat sekolah dikarenakan kondisi perekonomian yang kurang baik dengan penghasilan penduduk yang rata-ratanya

ekonomi menengah kebawah dengan penghasilan berkisar dari Rp200.000 – Rp300.000 perbulan sehingga kurangnya kemauan penduduk desa dari umur 7-15 tahun untuk berpartisipasi dalam Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun masih sangat kurang. Masih kurangnya sosialisasi yang pemerintah daerah berikan kepada masyarakat Desa Bati Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, betapa pentingnya pendidikan usia Wajib Belajar 9 tahun. Sosialisasi ini juga terhambat berbagai kendala, kendala ini disebabkan oleh berbagai hal yaitu : infrastruktur jalan yang masih rusak dan jarak antara rumah dan sekolah yang sangat jauh, kurangnya tenaga kerja yang mau pergi ke desa-desa terpencil, kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya sekolah, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai misalnya tidak ada komputer untuk melakukan aktivitas kantor, anak-anak di usia wajib sekolah lebih memilih membantu ekonomi keluarga dengan bekerja, masih percayanya masyarakat dengan kebudayaan nenek moyang, kurangnya dana pemerintah untuk membangun sekolah di setiap desa, kurangnya tenaga kerja guru dan lain-lain.

Selain pencapaian tujuan yang kurang optimal tersebut, beberapa masalah lain yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu kurang adanya sosialisasi oleh pemerintah daerah dan instansi terkait pada masyarakat

setempat khususnya masyarakat di Desa Bati dimana informasi tentang kebijakan wajib belajar 9 tahun ini hanya diperoleh para murid dan pihak sekolah yang disebarkan dari mulut ke mulut sehingga informasi yang di terima oleh orang tua murid tidak jelas, kurangnya jumlah tenaga pengajar di SDN 04 Bati .

Bahkan kondisi kurangnya jumlah guru tersebut juga terjadi di desa-desa lain seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD Bati, Beliau mengungkapkan kekurangan guru paling tinggi ada di tingkat SD, saat ini jumlah guru yang mengajar di SD Bati terdapat 2 orang guru tetap dan 3 orang guru honor di tambah dengan 1 orang Kepala Sekolah, idealnya untuk guru yang mengajar di SD bati seharusnya 10 sampai 12 orang. Menurut Kepala Desa Bati, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, ketika hujan terutama infrastruktur jalan dan menuju SD bati akan susah dilewati karena kondisi tanah yang buruk dan jembatan yang rusak. Dan juga masalah baru-baru ini sejak jalan semakin memburuk ada beberapa anak yang sudah mulai bermalas-malasan pergi ke sekolah karena lebih memilih untuk bekerja. Kondisi sarana sekolah khususnya SDN 04 Bati yang juga kurang memadai untuk proses belajar mengajar seperti perpustakaan yang kurang baik, buku-buku yang disediakan belum memadai jumlahnya bahkan perpustakaan jarang dibuka karena kekurangan

jumlah staf untuk menjaga perpustakaan, belum ada laboratorium, kondisi ruang tata usaha sekolah yang kurang memadai, unit kesehatan sekolah yang belum ada, halaman sekolah yang kurang baik beserta pagar sekolah yang sudah mulai rusak. Adanya perekonomian sebagian besar penduduk yang terbilang rendah juga menjadi kendala bagi sasaran program untuk melanjutkan pendidikan. Masalah lainnya ialah kurangnya kemauan *target group* untuk bersekolah, kemauan sekolah masyarakat pedesaan yang semakin rendah tersebut dikarenakan banyak fakta fakta dilapangan menunjukkan penduduk desa yang memiliki tingkat pendidikan tinggi namun pada akhirnya menjadi pengangguran, sehingga hal tersebut menjadi contoh bagi masyarakat desa bahwa tingkat pendidikan itu tidak menentukan keberhasilan dan kesuksesan seseorang.

Selain itu, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat pedesaan setempat yang masih tertanam dipikirkan beberapa kelompok masyarakatnya juga menjadi penyebab. Budaya masyarakat yang berpikir sederhana dalam menanggapi pentingnya pendidikan turut memberikan pengaruh dalam proses implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Desa Bati, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemerintah merealisasikan kebijakan ini diharapkan supaya bisa mengatasi

permasalahan pendidikan masyarakat Indonesia agar bisa mewujudkan persamaan hak atas pendidikan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, namun faktanya sampai saat ini masih banyak juga warga yang belum tuntas wajib belajar 9 tahun. Untuk itu perlu kajian yang mendalam terhadap kebijakan wajib belajar 9 tahun.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Kurangnya kemauan masyarakat untuk mengikuti program wajib belajar 9 tahun.
2. Kurangnya sosialisasi yang lebih jelas dari para pelaksana tentang Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Desa Bati, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Fokus Penelitian

Pada kebijakan wajib belajar 9 tahun ini didapatkan bahwa proses realisasi pengimplementasian kebijakan terkendala berbagai permasalahan terutama pada aspek proses implementasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga pencapaian tujuan kebijakan kurang efektif.

Seharusnya, dalam mensukseskan kebijakan wajib belajar 9 tahun ini diperlukan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat setempat. Untuk itu hal yang harus dilakukan

yaitu berupa peningkatan minat atau kemauan masyarakat untuk bersekolah yang berarti harus bisa merubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Maka fokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Desa Bati Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti ingin menulis tentang implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun. Untuk itu perumusan masalahnya yaitu “Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Desa Bati, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu kurang berhasil?”

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Desa Bati, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang berkaitan dengan ilmu administrasi Publik kajian kebijakan publik.

1.6.2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk menyusun kebijakan atau program di daerah, khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia atau kualitas hidup. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun.

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan terlahir dari suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menjawab suatu masalah atau peristiwa yang terjadi dimasyarakat luas. Tidak semua kebijakan berlaku menjadi kebijakan publik. Ada kata kebijakan, kebijakan publik, dan kebijaksanaan. Kata-kata tersebut memiliki maksud yang hampir sama, namun sebenarnya terdapat pada konteks yang berbeda. Oleh karena itu, maka sering kita temui adanya kekeliruan pendapat

dan pandangan mengenai kebijakan, kebijakan publik, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Budiardjo (2013:20) “kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.” Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Adapun definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Dye (dalam Agustino, 2006:7) “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan untuk tidak dikerjakan.” Menurut RC Chandler dan JC. Plano (dalam Syafiie, 2006: 105) “kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.” Menurut A. Hoogerwerf (dalam Syafiie, 2006:105-106) “kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.”

Pada konteks lain, menurut Islamy (dalam Anggara, 2012: 501) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau

tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam pengertian Islamy terdapat empat pengertian tentang kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijakan publik harus dengan senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Menurut Santoso (dalam Anggara, 2012:502) mengemukakan dua pandangan yang dapat menjelaskan konsep kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik diidentifikasi dengan tindakan-tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.
2. Kebijakan publik lebih memberikan penekanan atau perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Dalam pandangan terdapat dua kubu, yaitu kelompok yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud tertentu, dan kelompok

lainnya yang menganggap kebijakan publik sebagai akibat yang biasa diramalkan.

Menurut Anderson (dalam Anggara, 2012: 507-508) implikasi dari pengertian kebijakan publik adalah:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Jadi, bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Kebijakan publik bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Menurut Smith (1973,202-205) mengungkapkan 4 (empat) faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan, yaitu

1. Kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*)
2. Kelompok sasaran (*target groups*)
3. *Implementing organization*
4. *Environmental faktor*

Teori implementasi oleh Smith menjadi pisau analisis bagi peneliti dalam mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun belum berjalan dengan efektif atau kurang berhasil.

a. Kebijakan yang diidealkan (*Idealized Policy*)

Pada dasarnya tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Desa Bati Kecamatan Seberuang Kabupaten kapuas Hulu dengan harapan agar persentase siswa tamat SD semakin meningkat tiap tahunnya.

Tujuan dari kebijakan tersebut dirangkum dalam bentuk sebuah peraturan/ kebijakan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum. Peraturan tersebut sebagai bentuk interaksi antara pemerintah dalam menyampaikan maksud dan tujuan diterapkannya peraturan itu sendiri kepada masyarakat penerima peraturan/ kebijakan. Oleh karena itu kebijakan tersebut di anggap ideal (*idealized Policy*) dalam memecahkan permasalahan tentang implementasi kartu identitas penduduk musiman.

Menurut Smith (1973,203) kebijakan yang diidealkan adalah pola interaksi ideal yang didefinisikan oleh perumus kebijakan yang berusaha diinduksikan kepada kelompok sasaran

agar melaksanakan kebijakan. Empat kategori yang relevan dalam kebijakan yang diidealkan, yaitu Kebijakan yang resmi (*the formal policy*), Jenis kebijakan (*the Type of policy*), Program Gambaran Kebijakan (*image of policy*). Dalam kebijakan wajib belajar 9 tahun ini, pola interaksi ideal adalah bentuk/ cara interaksi yang sudah dianggap cocok/tepat yang kemudian digambarkan dalam sebuah kebijakan untuk selanjutnya dilaksanakan.

b. Kelompok Sasaran (*Target Group*)

Kelompok sasaran merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang menerima suatu kebijakan. Oleh karena itu, sikap kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan berpengaruh besar pada tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan karena mereka bisa saja menolak maupun menerima kebijakan yang diterapkan. Kelompok sasaran (*target group*), yaitu orang-orang dalam organisasi atau kelompok yang paling terpengaruh oleh kebijakan yang diharapkan dapat menyesuaikan pola perilakunya sesuai dengan tuntutan kebijakan. Beberapa hal yang relevan, yakni tingkat organisasi atau lembaga kelompok sasaran (*the degree of organization or institutionalization of the target group*) dan pengalaman sebelumnya dari kelompok sasaran (*the policy experience of the target group*).

c. Implementing Organization (Organisasi Pelaksana)

Sebuah kebijakan publik yang telah dibuat dalam pelaksanaannya membutuhkan administrator atau birokrat yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kebijakan tidak akan mempunyai arti jika tidak disertai tindakan-tindakan nyata dari pihak pelaksana sehingga administrator dalam implementasi sebuah kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap tercapainya tujuan kebijakan.

Terdapat tiga hal yang penting dalam organisasi pelaksana, yaitu struktur dan personil (*the structure and personel*), pimpinan organisasi administrasi (*the leadership of the administrative organization*) dan pelaksanaan program dan kapasitas (*the implementing program and capacity*).

d. Faktor Lingkungan (*Environmental Factor*)

Kebijakan yang diimplementasikan tentunya memiliki kendala atau tantangan pada terlaksananya dilapangan. Tantangan tersebut juga dapat berasal dari lingkungan masyarakat dimana kebijakan itu diterapkan sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan Kipem, unsur lingkungan turut mempengaruhi karena dukungan dari unsure lingkungan diperlukan dalam upaya mencapai tujuan dari implementasi kebijakan. Adapun unsur lingkungan tersebut

terdiri dari aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Fenomena-fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan ini, dikaji dengan menggunakan teori Smith dalam Islami (1973,202-205) yang terdiri dari empat faktor yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi, dan unsur-unsur lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi, sehingga diharapkan bisa tercapainya tujuan program yaitu berkurangnya jumlah anak putus sekolah di Desa Bati, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun kerangka pikir penelitiannya sebagai berikut:

Kerangka Pikir Penelitian

Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Desa Bati, Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

Permasalahan

1. Kurangnya kemauan masyarakat untuk mengikuti program wajib belajar 9 tahun.
2. Kurangnya sosialisasi yang lebih jelas dari para pelaksana tentang Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Desa Bati, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu.

Teori

Smith dalam Islami (1973,202-205) yang terdiri dari empat faktor yaitu :

1. kebijakan yang diidealkan
2. kelompok sasaran,
3. badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab
4. dan unsur-unsur lingkungan

↓

Output penelitian yang diharapkan

Tercapainya tujuan program yaitu berkurangnya jumlah anak putus sekolah di Desa Bati, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif di samping dapat mengungkap dan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa riil di lapangan juga dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi (*hidden value*) dari penelitian ini.

Peneliti merasa jenis ini yang cocok digunakan dalam masalah kebijakan wajib belajar 9 tahun di Desa Bati karena peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di lokasi penelitian sehingga apa saja faktor yang menyebabkan terhambatnya implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Desa Bati akan lebih jelas diketahui.

Selain itu peneliti juga perlu melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti agar mempertajam analisis data dan sebagai acuan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan wajib belajar 9 tahun pada hakekatnya merupakan suatu kebijakan di bidang pendidikan yang diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mengikuti pendidikan formal sampai jenjang SMP dengan bantuan anggaran dana BOS dari pemerintah.

Kebijakan ini akan bisa berhasil jika implementor dan sasaran program bisa saling bekerja sama, karena jika tidak terjalin kerjasama yang baik maka kebijakan akan sulit untuk berjalan dengan lancar. Tujuan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah mempertahankan dan meningkatkan pencapaian angka partisipasi pendidikan di SD/MI mendekati 100% dan meningkatkan daya SLTP/MTs dan yang setara, serta mencegah terjadinya angka putus sekolah atau angka mengulang, sehingga angka partisipasi di SLTP/MTs mencapai sekurang-kurangnya 85% secara nasional.

Melihat tujuan dari kebijakan wajib belajar 9 tahun tersebut, tentunya pemerintah harus bersikap serius dalam menangani masalah pendidikan. Para pelaksana kebijakan tersebut tentunya harus bisa mengikuti pedoman petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan. Namun, jika melihat pada kondisi di lapangan, pelaksanaan

yang dilakukan belum dijalankan sebagaimana mestinya.

Masih banyak terdapat kekurangan diantaranya seperti, masih ada anak-anak putus sekolah pada tingkat SD dan SMP, jumlah tenaga pengajar masih kurang memadai khususnya tenaga pengajar PNS, beberapa bangunan sekolah yang kurang mendukung untuk proses belajar mengajar, akses jalan menuju sekolah khususnya SDN 04 Bati yang kurang memadai apalagi ketika hujan bahkan dalam pelaksanaan kebijakan ini ada kesan dilaksanakan dengan setengah hati oleh beberapa implementor yang terlibat.

Kondisi pendidikan di Desa Bati yang sedikit memprihatinkan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti kemiskinan, rendahnya motivasi pendidikan, rendahnya kemauan masyarakat untuk bersekolah, pengaruh lingkungan sosial dimana beberapa sasaran terpengaruhi oleh teman, pernikahan dini dan keterbatasan fisik seperti cacat fisik maupun cacat mental. Kemiskinan dilihat dari jenis pekerjaan dan penghasilan rata-rata penduduk dimana mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani karet dan petani sawit. Rendah motivasi pendidikan bisa dilihat dari angka partisipasi masyarakat yang tamat SD dan SMP.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9

Tahun di Desa Bati Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Belum Berjalan dengan Efektif

1. Kebijakan Yang Diidealkan

menurut Smith dalam islamy yang menyatakan bahwa kebijakan yang diidealkan yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan. Sehingga jelas bahwa dalam suatu kebijakan agar prosesnya berjalan dengan lancar diperlukan adanya pola-pola interaksi ideal. Pola-pola interaksi tersebut bisa dari pemerintah kepada masyarakatnya ataupun dari masyarakat kepada pemerintah itu sendiri.

2. Kelompok Sasaran

Dalam suatu perumusan kebijakan pasti ada objek-objek tertentu yang menjadi target group pencapaian kebijakan. Objek-objek kebijakan tidak hanya berupa benda-benda, melainkan juga bisa berupa manusia seperti halnya terget group dalam kebijakan ini. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pengertian target group (kelompok sasaran) berdasarkan pengertian Smith yang menyatakan bahwa kelompok sasaran yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.

3. Organisasi atau Badan-badan Pelaksana

Organisasi atau Badan Pelaksana merupakan badan pelaksana atau unit-unit organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Dalam hal ini, orang atau lembaga yang ditunjuk oleh perumus kebijakan harus bisa melakukan tindakan untuk mensosialisasikan dan menerapkan aturan-aturan yang telah termuat di dalam kebijakan. Mensosialisasikan kebijakan tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak pelaksana saja melainkan lebih baiknya jika dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Adapun beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala dan staf Kantor Desa Bati, beserta pihak orang tua selaku pihak utama yang bisa membantu memberikan dorongan dan motivasi bagi sasaran program.

4. Unsur-unsur Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini, beberapa hasil wawancara dengan para narasumber berbeda juga didapat hasil yang hampir serupa yang menyatakan bahwa ada pengaruh unsur lingkungan dalam implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Desa BatiKecamatan Seberuang Kabupaten

Kapuas Hulu ini, yang mana meliputi lingkungan fisik seperti akses jalan yang kurang baik membuat anak-anak malas untuk pergi ke sekolah ketika hujan dan lingkungan sosial seperti dipengaruhi oleh teman, kondisi fisik (cacat) dan terpengaruh pergaulan yang kurang baik.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan melihat pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan berkenaan dengan implemetasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Desa BatiKecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, tidak serta merta perealisasiannya langsung dilaksanakan atau diterapkan begitu saja, tentu melihat suatu pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan agar mekanismenya bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, agar proses berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan dapat dilakukan dengan memahami bagaimana kebijakan yang

seharusnya diidealkan, baik itu mencakup pola-pola interaksi maupun mekanismenya dan bagaimana kebijakan itu diinduksikan. Semakin baik penerapan kebijakan yang diidealkan dan diinduksikan maka akan semakin baik pula proses implementasi akan berjalan.

2. Pencapaian tujuan kebijakan wajib belajar 9 tahun khususnya di Desa Bati Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu pada intinya tidak terlepas dari partisipasi kelompok sasarannya. Sebaik apapun, pemerintah dan dinas terkait melaksanakan suatu kebijakan yang sifatnya partisipatif seperti ini namun jika tidak ada tanggapan positif dari kelompok sasaran jelas suatu kebijakan itu sulit untuk bisa dikatakan berhasil. Disini partisipasi atau tanggapan positif dari kelompok sasaran terhadap kebijakan sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan itu sendiri.
3. Implementor atau instansi maupun lembaga lain yang terkait dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini merupakan badan-badan pelaksana yang memiliki tanggung jawab penting dalam memahami kebijakan yang diidealkan ini. Seberapa mengerti para implementor akan peraturan-peraturan yang seharusnya diterapkan, apa mereka sudah paham betul tentang kebijakan ini tentu memiliki pengaruh dalam pencapaian tujuan kebijakan wajib belajar 9 tahun. Terkait

dengan badan-badan pelaksana yaitu bagaimana para pelaksana menjalankan kebijakan, bagaimana sikap para pelaksana, bagaimana tindakan dan kepemimpinan pelaksana kebijakan dalam suatu instansi terkait. Sudah baikkah badan-badan pelaksana melaksanakan dan merealisasikan kebijakan terhadap kelompok sasarannya, adapun salah satu contoh tindakan yang seharusnya dilaksanakan berkaitan dengan kebijakan yaitu dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi dalam hal ini tidak hanya berupa seminar atau sejenis pertemuan lainnya. Sosialisasi suatu kebijakan bisa dilakukan dalam berbagai cara baik itu melalui media sosial dan media massa seperti radio, koran, internet, spanduk dan lain sebagainya.

4. Terkadang dalam pencapaian tujuan kebijakan tidak terlepas dari adanya pengaruh unsur-unsur eksternal seperti unsur-unsur lingkungan baik itu lingkungan fisik tempat peristiwa terjadi maupun lingkungan sosial dimana terjadi interaksi, kontrol sosial dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kebijakan. Meskipun pengaruh unsur-unsur lingkungan tidak terlalu memberikan pengaruh yang besar dalam suatu kebijakan, namun jika unsur-unsur lingkungannya kurang memadai hal tersebut akan semakin membuat pencapaian tujuan kebijakan akan sulit dicapai.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu beserta instansi terkait dapat melakukan sosialisasi kebijakan secara lebih intensif bila perlu para implementor ini terjun langsung ke lapangan supaya masyarakat dan kelompok sasaran bisa mendapatkan Informasi yang lebih jelas mengenai kebijakan wajib belajar 9 tahun
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah beserta Dinas Pendidikan, Pemerintah Desa dan pihak sekolah bekerja sama untuk bisa memberikan motivasi lebih kuat kepada masyarakat setempat khususnya kelompok sasaran agar dapat mengubah pola pikir sebagian besar masyarakat yang masih belum mau mendukung kebijakan
3. Sebaiknya sarana dan prasarana yang masih kurang memadai lebih ditingkatkan kualitas ataupun kuantitasnya agar dapat menambah minat para kelompok sasaran untuk tetap bersekolah
4. Sebaiknya kelompok sasaran bisa terus bersekolah dan jangan memandang sebelah mata tentang pentingnya pendidikan karena dengan adanya pendidikan yang cukup kita bisa berpikir luas dan setidaknya memiliki kualitas diri yang cukup baik pula.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agustmo, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Anggara^Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV PUSTAKA
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto Dany dan G. Edwi Nugrohadhi. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Koentjaramngnat. 2011. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: PT RINEKA CDPTA.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Smith, Thomas B. 1973. *The Policy Implementation Process*. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Supriadi, dkk. 2011. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: CV. MAULANA MEDIA GRAFIKA.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: A1P1 Bandung.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wulansari, C. Dewi. 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: PT Refika Aditama.
- 2) Pengarang skripsi:
- H. Tukuran, Janto. 2015. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajib e q/ar Tahun di Kabupaten Minahasa Utara*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.
- Wibowo, Krisno. 2013. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis dan wajib belajar Tahun di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong utara*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
- 3) Sumber instansi dan undang-undang:
- Kantor Desa Bati. 2018. *Data Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin di Desa Bati*.
- Kantor Desa Bati. 2018. *Data Penduduk Usia 7-15 Tahun (Target Group) yang Tamat Sekolah di Desa Bati*.
- Kantor Desa Bati. 2016. *Data Penduduk Usia 7-15 Tahun (.Target Group) yang 1 idak Tamat Sekolah atau Tidak Bersekolah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu.
- 4) Rujukan elektronik:
- Blogger. 2013. *Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat desa*, diambil pada Tanggal 1 Juni 2018 dari <http://ekoqren.blogspot.co.id>.
- Dadang. 2016. *Jumlah Pencairan Dana Bos Persiswa*, diambil pada Tanggal 5 Juni 2016 dari <http://www.dadangisn.com/2016/Q7/iuml-ah-pencairan-dana-bos-persiswa.html>.

Dokumen